

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis dan kekayaan alam yang bervariasi dan melimpah. Hal tersebut serupa dengan pernyataan Septianda (2024), yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi kekayaan alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai penunjang sektor ekonomi baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan perekonomian daerah dilakukan sebagai langkah awal tindakan pembangunan nasional. Menurut Mahi, dalam Rahayu (2024), pembangunan daerah dilakukan sebagai tindak mengatasi kesenjangan pertumbuhan, dan kesejahteraan pada setiap daerah di Indonesia dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menyatakan bahwa pada rangka penyelenggaraan pemerintahan maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan daerah sebagai rangka pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan hal yang disertai dengan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, hal tersebut disampaikan oleh Budi dkk. (2020), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didukung dengan adanya potensi yang dimanfaatkan oleh setiap daerah yang kemudian disebut dengan sektor unggulan di daerah tersebut.

Permasalahan pembangunan ekonomi lokal di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ditunjukkan melalui rendahnya kualitas dan kegiatan Sumber Daya Manusia pada sektor ekonomi, serta kenyataan keterbatasan aktivitas ekonomi produktif. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat masih bekerja pada sektor tradisional seperti pertanian, peternakan, dan perdagan pada skala kecil, yang berarti pendapatan masyarakat berada pada kondisi fluktuatif. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan masyarakat dalam mengakses modal, mengelola usaha, dan memanfaatkan potensi lokal belum optimal. Pernyataan permasalahan lain yang terjadi di Kecamatan Kesamben adalah minimnya disversifikasi usaha serta keterbatasan pengetahuan kewirausahaan yang menyebabkan masyarakat kesulitan keluar dari permasalahan ekonomi yang berulang terutama bagi kelompok rentan seperti Rumah Tangga Miskin atau RTM, serta pelaku UMKM. Hambatan lain juga terdapat pada kenyataan masyarakat di Kecamatan Kesamben masih berada pada kondisi kemampuan literasi digital dan keuangan yang rendah, sehingga menjadi hambatan bagi masyarakat di desa-desa tersebut untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi modern yang berkembang seiring kemajuan zaman.

Berdasarkan uraian di atas maka persoalan pembangunan ekonomi lokal tidak hanya berkaitan dengan aspek ketersediaan potensi ekonomi, namun juga dengan kapasitas SDM sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi lokal di keempat belas desa di Kecamatan Kesamben, dikarenakan pembangunan ekonomi lokal membutuhkan masyarakat yang berdaya, mampu mengelola sumber daya yang ada serta memiliki akses terhadap modal dan peluang usaha, maka dari itu

pemberdayaan masyarakat melalui keberadaan BumDesMa Berkah Lestari Mandiri menjadi diperlukan sebagai langkah solutif mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi.

Pengembangan ekonomi masyarakat menurut Mandhaputri dkk. (2023), merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Menurut Ariyani dkk. (2021), pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang diadakan dengan tujuan untuk mengadakan kemandirian dalam diri masyarakat. Maksud dari hal tersebut adalah dengan terselenggaranya pemberdayaan masyarakat, maka terdapat masyarakat dengan ciri kemampuan berpikir yang mandiri, pengambilan keputusan logis, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah termasuk permasalahan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan pula oleh World Bank dalam sumber yang idem dengan menyatakan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya yang dilakukan demi memerikan kemampuan pada masyarakat untuk menyuarakan ide, pendapat, dan keberanian dalam menentukan pilihan demi kebaikan individu, maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dan terdiri dari berbagai tahapan, yang menurut Adi, dalam Ariyani dkk. (2021), berupa: (1) Tahapan Persiapan yang memiliki peranan dalam menyiapkan petugas, dan menyiapkan lapangan atau area pemberdayaan masyarakat dilakukan; (2) Tahap pengkajian, yakni proses pelibatan masyarakat daerah dalam proses pemberdayaan dikarenakan adanya asas yang menyatakan bahwa masyarakat wilayah tersebut lebih mengerti kondisi wilayah serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan dibandingkan dengan pihak lain; (3) Tahap

perencanaan alternatif merupakan kegiatan desain program dengan melibatkan masyarakat setempat untuk membicarakan permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan dengan adanya sebuah program; (4) Tahap formulasi rencana, yakni masyarakat sebagai fasilitator merupakan menjabarkan secara rinci mengenai informasi yang dapat digunakan untuk mempermudah pelaksanaan program; (5) Tahap implementasi, yang berarti tahap pelaksanaan program, dan berupa aktualisasi kegiatan yang melibatkan masyarakat di lapangan; (6) Tahap evaluasi, merupakan tahapan yang berfungsi untuk meninjau indikator keberhasilan program yang dilaksanakan serta pengadaan stabilisasi terhadap kebiasaan baru yang diharapkan terjadi; (7) Tahap terminasi merupakan tahapan yang menyatakan gambaran fakta bahwa program telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan bahwa program tersebut berhasil dalam memberdayakan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat ditinjau dengan adanya indikator pemberdayaan masyarakat.

Indikator pemberdayaan masyarakat menurut Suharto, dalam Aguswan & Mirad (2021), yakni adanya: (1) Pemungkinan, hal ini berarti pemberdayaan masyarakat yang dilakukan menciptakan iklim yang menungkinkan adanya perkembangan masyarakat secara optimal; (2) Penguatan, hal ini berbicara mengenai adanya penguatan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan; (3) Perlindungan, yang berarti tindakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berhasil dalam melindung masyarakat yakni kelompok lemah untuk tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dalam bidang sosial

dan ekonomi, serta mencegah terjadinya eksplorasi oleh pihak kuat ke pihak yang lemah; (4) Penyokongan, hal ini berbicara mengenai adanya proses bimbingan dan dukungan kepada masyarakat selama proses pemberdayaan masyarakat dilakukan; (5) Pemeliharaan, hal ini berarti adanya pemertahanan kondisi yang kondusif sehingga suasana dalam masyarakat tetap aman.

Relevansi indikator pemberdayaan masyarakat menurut Suharto dapat terlihat secara nyata dalam praktik yang dilakukan oleh BumDesMa Berkah Lestari Mandiri di Kecamatan Kesamben. Pertama, aspek pemungkinan tercermin dari keberadaan berbagai unit usaha seperti toko bangunan, counter HP, dan layanan pinjaman yang membuka peluang bagi masyarakat desa untuk mengakses layanan ekonomi tanpa harus bergantung pada kota. Kedua, penguatan dilakukan melalui fasilitasi modal pinjaman kelompok dengan bunga rendah, yang memungkinkan kelompok masyarakat seperti petani pensiun atau pelaku UMKM memperoleh daya ekonomi baru secara mandiri. Ketiga, perlindungan diwujudkan melalui kebijakan prioritas pemberian pinjaman kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), sehingga kelompok rentan secara ekonomi tetap dapat terlibat dalam kegiatan produktif tanpa tertindas oleh pelaku usaha yang lebih besar. Keempat, penyokongan tampak dari adanya pelatihan dan pendampingan kelompok usaha serta insentif pembayaran tepat waktu (IPTW) yang bertujuan menjaga keberlanjutan usaha dan solidaritas kelompok.

Variabel terakhir yakni, pemeliharaan ditunjukkan dari model pinjaman berbasis kelompok dengan sistem rotasi, yang menciptakan sistem ekonomi gotong royong yang menjaga keberlangsungan usaha masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu elemen masyarakat yang wilayahnya berperan dalam pembangunan daerah dan menerapkan pemberdayaan masyarakat adalah desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan adanya batasan wilayah yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan, (Surbakti dkk., 2022). Pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilaksanakan dengan berbagai metode salah satunya adalah BumdesMa. Keberadaan BumDesMa berarti terselenggaranya penghimpunan kekuatan masyarakat antar desa di sebuah wilayah untuk kemudian membentuk jaringan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan pernyataan Putri, (2021), pendirian BumDesMa merupakan alternatif dikarenakan BumDes yang mangkrak sehingga pemerintah Indonesia memberikan alternatif berupa adanya kegiatan Kerjasama antar desa untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dasar Hukum pendirian BumDesMa adalah Permendesa No 4 Tahun 2015 pasal 6 yang menyebutkan bahwa dua desa atau lebih dapat mendirikan suatu BUMDesMa yang disepakati oleh Musyawarah Antar Desa (MAD), yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Pembentukan BumDesMa menurut Rosyidah dkk. (2021), merupakan bentuk pengoptimalan kegiatan BumDes yang tidak optimal dalam memberdayakan masyarakat, sehingga dibentuklah BumdesMa yang terdiri dari beberapa desa pada suatu wilayah kecamatan atau lebih. Salah satu BumDesMa yang terdapat pada wilayah kecamatan adalah BumDesMa Berkah Lestari Mandiri di Kecamatan, Kesamben, Kabupaten Jombang. BumDesMa Berkah Lestari Mandiri merupakan salah satu BumdesMa yang ada di wilayah Kabupaten

Jombang, tepatnya di Kecamatan Kesamben yang menaungi seluruh desa di kecamatan tersebut. Pendirian BumDesMa Berkah Lestari Mandiri diprakarsai oleh peralihan lembaga PNPM (Program Nasional Pedesaan Masyarakat). Lembaga PNPM adalah lembaga yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM merupakan program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Fitri (2021), PNPM Mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat mulai diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 sebagai program nasional yang merupakan program di bawah naungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Kementerian dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (PMK 81), BLM dapat digolongkan sebagai bantuan sosial (Bansos), dandidefinisikan sebagai transfer/pengalihan uang, barang atau jasa dari pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk penanggulangan risiko sosial, dalam hal ini untuk penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut PMK 81menegaskan bahwa BLM yang dialokasikan tersebut menjadi milik masyarakat. Sesuai dengan kelompok sasarannya, dana dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah milik masyarakat kecamatan. Proses peralihan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dilakukan dengan Musyawarah Antar Desa (MAD). Proses ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 15 Tahun 2021.

Tahapan peralihan PNPM-MPD menjadi BUMDesma, yaitu: Pengalihan aset, Pengalihan kelembagaan, Pengalihan personil, Pengalihan kegiatan usaha. Peralihan PNPM-MPD menjadi BUMDesma bertujuan untuk memperkuat peran BUMDes dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai pilar ekonomi di tingkat desa.

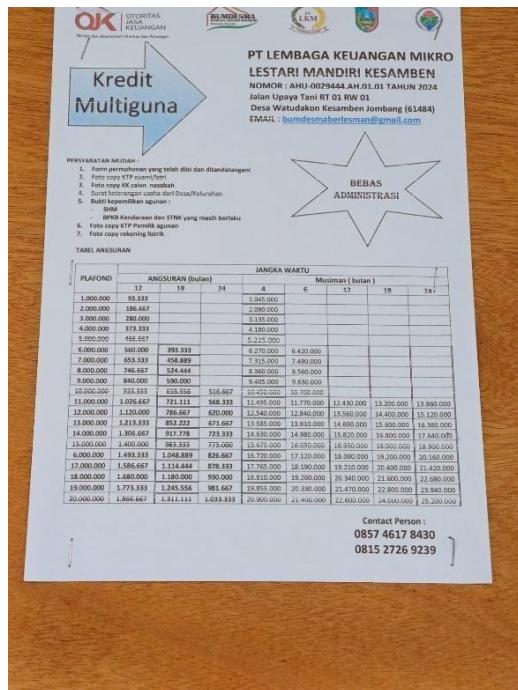
Proses perubahan PNPM menjadi BumDesMa secara merinci dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai BUMDesMa yang dinyatakan pada pasal 73 yang mengamanahkan dana sebesar 12,7 T yang dikelola oleh 5.328 UPK Eks PNPM harus ditransformasi atau dirubah menjadi BumDesMa (Fitri, 2021). BumDesMa baik dari pengesahan dan pengembangan menurut Qiza, (2024), merupakan tanggung jawab dan wewenang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (DPMD). Hal tersebut dikarenakan tugas dari DPMD yang juga berperan dalam merubah paradigma masyarakat desa untuk dapat menciptakan ide kreatif melalui kegiatan usaha yang dilakukan bersama dengan masyarakat.

Landasan operasional BumDesMa berada pada pasal 3 Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021, yang menyatakan bahwa BumDesMa secara operasional bertujuan untuk: (1) melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan prokluktivitas perekonomian, dan potensi Desa; (2) melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui penSrsdl.an barang danlatau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa; (4) pemanfaatan Aset Desa

guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. BumDesMa Berkah Lestari Mandiri merupakan lembaga badan usaha yang dibentuk oleh 14 desa di Kecamatan Kesamben pada November 2021. BUMDesma Berkah Lestari Mandiri merupakan induk dari usaha BUMDes yang ada di desa- desa pada Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. 14 Desa yang menjadi bagian anggota BumDesMa Berkah Lestari Mandiri adalah Jombok, Wuluh, Blimbing, Carangrejo, Watudakon Pojokrejo, Kesamben, Podoroto, Kedungmlati, Kedungbetik, Gumulan, Jati Duwur, Jombatan, Pojok Kulon. Komoditas barang atau jasa yang dijual oleh BumDesMa Berkah Lestari Mandiri bervariasi dimulai dari Sembilan Bahan Pokok (Sembako), Barang Elektronik (Handphone), Kopi, Layanan pembayaran listrik, BPJS, PDAM, transfer atau top up, dan layanan pinjaman (*Sumber: Wawancara dengan pengurus BumDesMa Berkah Lestari Mandiri*). Keberadaan BUMDesMa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Berkah Lestari Mandiri di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian masyarakat di 14 desa yang dinaunginya.

Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan ekonomi BumDesMa Berkah Lestari Mandiri yang menyediakan beragam komoditas seperti sembako, barang elektronik (handphone), kopi, serta layanan pembayaran listrik, BPJS, PDAM, transfer, dan top-up, BUMDesMa mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus bergantung pada pusat perbelanjaan yang relatif jauh, hasil wawancara dengan Adelia, (23) Selain itu, layanan utama berupa pinjaman

kelompok dan pinjaman perorangan memberikan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha masyarakat.



Gambar 1.1 Brosur Pinjaman, Brosur Promosi Produk Kredit, (2025)

Gambar 1.1. menunjukkan brosur promosi produk *Kredit Multiguna* dari PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Lestari Mandiri Kesamben, yang merupakan salah satu unit usaha dari BUMDESMA Berkah Lestari Mandiri Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Produk tersebut menawarkan kemudahan akses pemberian pinjaman mulai dari satu juta hingga dua puluh juta rupiah, serta pilihan angsuran fleksibel mulai dari 12 hingga 36 bulan. Persyaratan pengajuan pinjaman berupa fotokopi KTP, KK, bukti kepemilikan agunan, hingga surat keterangan usaha mencerminkan adanya upaya inklusi keuangan bagi masyarakat desa. Kegiatan tersebut merupakan bagian nyata dari strategi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi

lokal melalui akses modal yang terjangkau dan cepat. Dalam konteks pemberdayaan, kehadiran kredit produktif semacam ini memungkinkan pelaku UMKM dan usaha kecil lainnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya. LKM sebagai bagian dari BUMDESMA berperan aktif dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan tetap mengedepankan asas keberlanjutan dan pemberdayaan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka, produk Kredit Multiguna ini menjadi bukti konkret bahwa kelembagaan ekonomi lokal yang berbasis desa mampu menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan partisipatif. Hal tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keberadaan BUMDesMa juga memperkuat ekonomi lokal dengan memastikan perputaran uang tetap terjadi di desa, sekaligus mendiversifikasi sektor ekonomi melalui produk dan layanan yang bervariasi. Selain hal tersebut, layanan keuangan dan transaksi digital yang disediakan turut meningkatkan literasi keuangan dan digital masyarakat, sehingga mendukung inklusi keuangan di tingkat pedesaan. Di sisi lain, pinjaman kelompok yang ditawarkan BUMDesMa juga mempererat solidaritas sosial dan ekonomi antarwarga desa. Dengan berbagai kontribusi ini, BUMDesMa Berkah Lestari Mandiri menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendorong kemandirian ekonomi, dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BumDesMa) Berkah Lestari Mandiri memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kecamatan

Kesamben, Kabupaten Jombang. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan perekonomian desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi lokal. BumDesMa ini menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, usaha yang dikelola oleh BumDesMa, seperti perdagangan, jasa, dan pengelolaan sumber daya alam, turut mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Hal tersebut dipaparkan dalam hasil wawancara dengan Adelia, (23), selaku pengurus BumDesMa Berkah Lestari Mandiri pada tanggal 20 Januari, 2025 yang menyatakan bahwa peningkatan kegiatan usaha yang terdapat pada Kecamatan Kesamben dan dibawahi oleh BumDesMa Berkah Lestari Mandiri yakni: (1) Toko Bangunan yang baru didirikan November, 2024, dengan laba sementara Rp 11 Juta Rupiah; (2) Counter Kredit HP dengan laba Rp 8 Juta Rupiah yang didirikan sejak Agustus 2024; (3) Sembako, dengan laba total Rp 56 Juta yang berdiri sejak akhir tahun 2023; (4) Usaha kopi Blimbings, yang meningkatkan pendapatan petani kopi di desa Blimbings, Kecamatan Kesamben; (5) Layanan pembayaran listrik, top up, BPJS, PDAM dengan laba rata-rata Rp 300 ribu per-bulan.

Wawancara penelitian yang lain juga dilakukan dengan Bapak Topo (54), warga Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, yang menjadi salah satu mitra BumDesMa Berkah Lestari Mandiri, dengan membuka usaha penjualan aksesoris ponsel pintar, pulsa, dan layanan dompet atau pembayaran digital lain, sebagai mitra dari BumDesMa Berkah Lestari Mandiri dengan hasil wawancara sebagai berikut: "Dengan adanya BumDesMa Berkah Lestari Mandiri

ini, saya dan beberapa orang lain yang awalnya bekerja sebagai petani atau peternak bebek di Desa Watudakon ini, dikarenakan beberapa alasan seperti usia, dan tenaga maka kami harus beralih pekerjaan yang bersifat lebih sering di rumah, dikarenakan tenaga sudah tidak mumpuni untuk melakukan pekerjaan lapangan, akhirnya saya dibantu oleh anak saya mengajukan pinjaman usaha ke BumDesMa, bersama dengan teman-teman saya yang lain untuk membentuk yang namanya grup pinjaman usaha, dan dari modal itu saya sekarang menjalankan usaha ini, mungkin secara finansial tidak banyak dikarenakan keuntungan per-bulan hanya berada di kisaran 2-3 juta rupiah namun hal tersebut dapat dirasakan sebagai manfaat ketika umur saya sudah tua begini.”

BUMDesMa Berkah Lestari Mandiri memiliki sejumlah keunikan yang menjadikannya layak untuk diangkat sebagai objek penelitian dalam ranah administrasi publik. Keunikan pertama terletak pada cakupan wilayahnya, yaitu membawahi 14 desa di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, sehingga dapat menjadi model kolaborasi antar-desa dalam pengelolaan ekonomi berbasis lokal, (*Sumber: Wawancara dengan pengurus BumDesMa Berkah Lestari Mandiri*).

Kedua, variasi komoditas dan layanan yang ditawarkan, mulai dari sembako, barang elektronik, kopi, hingga layanan pembayaran digital dan keuangan, menunjukkan kemampuan BUMDesMa ini dalam menjawab kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang komprehensif dan inovatif. Ketiga, fokus pada layanan pinjaman kelompok dan individu untuk pengembangan UMKM lokal mencerminkan peran strategis BUMDesMa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat mikro.

Selain itu, BUMDesMa ini juga berfungsi sebagai agen literasi keuangan dan digital, sebuah langkah yang relevan dengan transformasi teknologi dalam tata kelola administrasi publik.

Keberhasilannya dalam mengelola beragam aktivitas bisnis yang mendukung pembangunan ekonomi desa menjadikannya contoh konkret implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Dengan berbagai keunikan ini, penelitian mengenai BUMDesMa Berkah Lestari Mandiri dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami peran dan efektivitas lembaga desa dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat, serta bagaimana kolaborasi dan inovasi administrasi publik dapat diterapkan secara berkelanjutan. (1) Toko Bangunan yang baru didirikan pada November 2024, dengan laba sementara sebesar Rp 11 juta selama dua bulan pertama beroperasi (rata-rata Rp 5,5 juta per bulan); (2) Counter Kredit HP yang berdiri sejak Agustus 2024 dengan laba rata-rata Rp 8 juta per bulan; (3) Usaha Sembako yang berdiri sejak akhir tahun 2023, dengan total laba Rp 56 juta selama satu tahun terakhir (rata-rata Rp 4,67 juta per bulan); (4) Layanan pembayaran listrik, top up, BPJS, dan PDAM dengan laba rata-rata Rp 300 ribu per bulan; (5) Usaha kopi Blimbings yang meningkatkan pendapatan petani kopi di Desa Blimbings, tanpa data laba spesifik, namun tercatat peningkatan omzet hingga 20% dalam musim panen terakhir.



Gambar 1.2 Produk Kopi Blimbings

Sumber: Dokumentasi Pribadi, (2025)

Selain itu, wawancara dengan Bapak Topo (54), pada tanggal 25 Januari 2025, warga Desa Watudakon, menunjukkan bahwa sebagai mitra penjualan aksesoris ponsel pintar, pulsa, dan layanan dompet digital yang difasilitasi BumDesMa, ia memperoleh laba bersih rata-rata Rp 2 juta per bulan dari hasil penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BumDesMa Berkah Lestari Mandiri tidak hanya menjadi wadah pengelolaan potensi ekonomi desa, tetapi juga terbukti mampu memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan unit usaha yang dikelola. Keberhasilannya dalam menciptakan peluang kerja, menyediakan akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, serta memperkuat solidaritas antarwarga menunjukkan bahwa BumDesMa ini telah menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan

kemandirian ekonomi dan pembangunan desa yang berkelanjutan di Kecamatan Kesamben.

Salah satu studi terdahulu yang relevan dengan topik ini adalah penelitian oleh Putri (2024), yang mengangkat judul "*Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Terpadu Badan Usaha Milik Desa Bersama Sumberrejo Berkah Mandiri Sejahtera (SBMS) Lembaga Keuangan Desa (LKD), Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.*" Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat telah dijalankan oleh BUMDesma SBMS LKD melalui pengelolaan unit usaha yang dimiliki, dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan yang optimal serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan telah mendorong BUMDesma SBMS LKD menjadi sarana pemberdayaan yang efektif sekaligus berkontribusi terhadap terwujudnya desa yang berdaya, sejahtera, dan berkelanjutan. Penelitian ini mengacu pada teori dari Sarah Cook dan Steve Macaulay, yang menekankan pada enam aspek utama: kewenangan (authority), rasa percaya diri dan kemampuan (confidence and competence), keyakinan (trust), peluang (opportunities), tanggung jawab (responsibilities), dan dukungan (support). Pemberian pinjaman modal kepada masyarakat dijadikan sebagai sarana pemberian wewenang, sementara pembinaan usaha difungsikan untuk membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kompetensi pelaku usaha lokal. Peningkatan ekonomi Masyarakat dan Mitra Usaha sebelum dan sesudah BUMDESMA Berkah Lestari Mandiri berdiri ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Peningkatan ekonomi Masyarakat dan Mitra Usaha sebelum dan sesudah BUMDESMA Berkah Lestari Mandiri berdiri

Unit Usaha / Sektor Mitra Bumdesma	Rata-rata pendapatan Bulanan Sebelum Berdirinya Bumdesma	Rata-rata pendapatan bulanan setelah Berdirinya Bumdesma	Presentase Peningkatan
Toko Bangunan	(Belum ada usaha)	Rp 5.500.000,00	-
Counter dan Kredit Ponsel	(Belum ada usaha)	Rp 8.000.000,00	-
Usaha Sembako	Rp 3.000.000,00	Rp 4.670.000,00	55,7%
Petani Kopi Blimbing	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	20%
Layanan Pembayaran & Top Up	Rp 200.000,00	Rp 300.000,00	50%
Mitra Aksesoris HP	Rp 1.200.000,00	Rp 2.000.000,00	66,7%

Sumber: Laporan Keuangan Bumdesma Berkah Lestari Mandiri, (2025)

Kepercayaan terhadap kemampuan pengelolaan modal awal juga ditumbuhkan dengan pengembangan unit usaha baru. Selain itu, pelatihan tidak hanya diberikan kepada pengurus, tetapi juga kepada anggota kelompok usaha sebagai bentuk penyediaan kesempatan dalam mengelola kegiatan ekonomi. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan studi ini karena sama-sama memfokuskan perhatian pada objek kajian BUMDesma. Namun, perbedaannya terletak pada landasan teoritis yang digunakan; jika penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan dari Sarah Cook dan Steve Macaulay, maka penelitian ini mengadopsi konsep pemberdayaan masyarakat berdasarkan pandangan Suharto,

sebagaimana dikutip dalam Aguswan & Mirad (2021). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini yakni pada objek penelitian atau BumDesMa yang diteliti serta masyarakat desa yang dikaji. Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian dalam skripsi berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Bumdesma Berkah Lestari Mandiri Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*"

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji BumDesMa sebagian besar menggunakan pendekatan teori pemberdayaan yang berbeda, seperti teori ACTORS, strategi POAC, maupun model pemberdayaan berbasis kewenangan, kompetensi, dan dukungan. Pendekatan-pendekatan tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek manajerial kelembagaan, strategi bisnis, atau faktor pendukung pemberdayaan secara umum. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah pemberdayaan masyarakat menggunakan indikator 5P menurut Suharto, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Indikator 5P tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam melihat proses pemberdayaan masyarakat, karena tidak hanya menilai kemampuan atau dukungan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga mengkaji perlindungan terhadap kelompok rentan, keberlanjutan proses pemberdayaan, serta upaya menjaga kondisi sosial agar tetap kondusif.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal melalui BumDesMa Berkah Lestari Mandiri Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal melalui BumDesMa Berkah Lestari Mandiri Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal. Secara khusus, ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana implementasi kebijakan BUMDes dapat mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik bagi studi kebijakan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan sumber daya lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan kepada pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat terkait strategi yang efektif dalam mengelola BUMDes. Temuan studi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala implementasi kebijakan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menciptakan program pemberdayaan masyarakat yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, sehingga

berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Kecamatan Kesamben.